

# BAB IV

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN METODE WEIGHTED AVERAGE

Nazilatul Ulya<sup>1)</sup>, Henny Murtini<sup>2)</sup>, Atik Ul  
Mussanadah<sup>3)</sup>

Accounting study program, Faculty of Economics and  
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[nazilaulya02@gmail.com](mailto:nazilaulya02@gmail.com)<sup>1)</sup>,

[hennymurtini@mail.unnes.ac.id](mailto:hennymurtini@mail.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>,

[atikulmussa@mail.unnes.ac.id](mailto:atikulmussa@mail.unnes.ac.id)<sup>3)</sup>



**Abstrak** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel ukuran pemerintahan, jumlah penduduk, umur pemerintahan, dan kompleksitas pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah 1.542 Kabupaten/Kota di Indonesia TA. 2020-2022. Sampel ditentukan dengan menggunakan tabel sampel *Isaac* dan *Michael*. Penelitian ini menggunakan metode *random sampling* menggunakan laporan BPK RI tahun 2020-2022 sebanyak 240 sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang diolah menggunakan aplikasi Stata MP versi 17. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk dan umur pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Umur Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah

## **Pendahuluan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih belum optimal yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemandirian dan ketidakefisienan keuangan daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibanding dana dari pemerintah pusat yang dapat mengakibatkan pemerintah daerah kurang menggali potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, tingkat efisiensi keuangan daerah di Indonesia tahun 2017-2021 memiliki rata-rata sebesar 100,69 persen atau dikategorikan tidak efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih rendah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang rendah mengindikasikan manajemen keuangan daerah tidak dikelola dengan tepat yang menimbulkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang baik (Nzama, 2024).

Pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta transparansi dan akuntabilitas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah (Ramadana *et al.*, 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Evaluasi hasil atau capaian kinerja menjadi tolak ukur untuk menilai kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan upaya meningkatkan PAD. Pengukuran kinerja keuangan digunakan pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga bagi masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik (Djuniar & Zuraida, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Sari, 2016). Dengan kata lain, kinerja keuangan dapat dideteksi dengan melakukan analisis laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah karena laporan keuangan merupakan alat penting yang memuat informasi mengenai posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai. Analisis menggunakan metode rata rata tertimbang (*weighted average*) melalui empat indikator rasio keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu daerah secara komprehensif. Empat rasio keuangan tersebut meliputi rasio kemandirian, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Analisis rasio keuangan tersebut menjadikan masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya apakah sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah dan pengalokasiannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Masdiantini & Erawati, 2016).

Pemerintah daerah di Indonesia sering dijumpai bahwa PAD cenderung lebih kecil dari dana perimbangan. Realisasi PAD seluruh kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2017 sampai 2021 lebih kecil dibanding dengan dana perimbangan yang berarti tingkat ketergantungan keuangan daerah tinggi dan tingkat kemandirian yang rendah. PAD yang kecil juga dapat menyebabkan menurunnya proporsi pendapatan daerah dan menyebabkan defisit anggaran. Defisit anggaran yang ekstrim dapat terjadi akibat kurangnya pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan kontrol dalam mengalokasikan APBD. Daerah yang



mengalami defisit anggaran salah satunya adalah Kabupaten Jepara. APBD Kabupaten Jepara tahun 2023 mengalami defisit sekitar Rp 80 miliar yang disebabkan oleh PAD yang belum mencapai target senilai Rp 31 miliar dan tingkat likuiditas anggaran yang tidak stabil disebabkan oleh salah satunya SiLpa (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran). Kasus yang sama terjadi pada Kabupaten Pangandaran yang mengalami defisit anggaran yang cukup besar mencapai Rp 351 miliar pada tahun 2023 sehingga diperlukan efisiensi keuangan daerah dengan menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Efisiensi keuangan daerah sangat penting dilakukan karena menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan (Widodo, 2022). Efisiensi keuangan daerah kabupaten atau kota di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 rata-rata sebesar 100,69 persen atau dapat dikatakan tidak efisien. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah masih rendah dikarenakan belum dapat menekan jumlah belanja daerah (Fathah, 2017).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor finansial, faktor lingkungan, dan faktor kesejahteraan (Alfi & Sari, 2023). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya ukuran pemerintah. Ukuran pemerintah adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena aset yang dimiliki cukup untuk melakukan berbagai pembiayaan. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar lebih fleksibel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan memanfaatkan sumber daya daerahnya. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri *et al.* (2023) berkesimpulan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti

& Suryandari (2020) yang memberikan kesimpulan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Noviyanti & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah jumlah penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu daerah melalui adanya permintaan dan penawaran (Alfi & Sari, 2023). Peningkatan kegiatan ekonomi tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah yang diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) berkesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfi & Sari (2023) yang memberikan kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nashiruddin & Witono (2024) dan Saldi *et al.* (2021) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Umur pemerintah adalah salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Umur pemerintah merupakan tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2014). Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut sudah berpengalaman dalam mengelola keuangan daerah yang terdiri dari proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewata *et al.* (2018) berkesimpulan bahwa umur pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) yang memberikan kesimpulan bahwa



umur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kompleksitas pemerintah. Kompleksitas pemerintah merupakan tingkatan diferensiasi pada pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan (Saputro & Mahmud, 2015). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempresentasikan kompleksitas pemerintah di Indonesia. SKPD berfungsi untuk menjalankan fungsi eksekutif dan berkoordinasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. SKPD atau perangkat pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) dan Wijayanti & Suryandari (2020) berkesimpulan bahwa kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu masih banyak memberikan hasil yang berbeda dan tidak konsisten dengan penelitian lainnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga peneliti hendak menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah teori *stewardship* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991. Teori *stewardship* pada pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Teori *stewardship* menggambarkan situasi bahwa pemerintah daerah sebagai steward bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik dan digunakan sesuai tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai principal (Gatawa, 2022). Sehingga teori *stewardship* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, umur pemerintah, dan kompleksitas pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, topik sentral pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, dianggap penting untuk penelitian ini. Penggunaan pengukuran empat rasio keuangan dengan metode *weighted average* sebagai ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dan perbedaan model penelitian dapat menjadi orisinalitas penelitian ini. Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2020- 2022.

## **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

*Stewardship* adalah sebuah teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik atau principal (Gatawa, 2022). Teori *stewardship* dikembangkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991, yang mengatakan bahwa pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai *principal* sedangkan keberadaan pemerintah daerah sebagai *steward*. Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi sektor publik yang dipercaya oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya di bidang keuangan dengan baik sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat sebagai *principal*. Ketika pemerintah telah berhasil mencapai tujuan tersebut maka masyarakat akan puas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atas pelayanan publik yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan ukuran pemerintah sebagai variabel independen. Ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya daerah tersebut dengan dapat melihat total aset yang dimiliki daerah (Pratiwi & Aryani, 2017). Besarnya ukuran pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional melalui total aset yang cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran (Safitri *et al.*, 2023). Pemerintah daerah dengan aset yang besar diasumsikan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Seiring dengan bertambahnya aset yang dimiliki suatu daerah juga besar



tuntutan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Didukung dengan hasil penelitian Safitri *et al.* (2023) dan Zamzami & Rakhman (2023) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>1</sub>: Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk suatu wilayah akan memengaruhi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik (Dewata *et al.*, 2018). Jumlah penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat yang tentunya akan menjadi tambahan pendapatan bagi daerah. Masyarakat dapat lebih memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan lainnya yang dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang maksimal serta mendukung terciptanya kinerja keuangan daerah yang baik. Didukung dengan hasil penelitian Rofiq & Arza (2021) dan Dewata *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>2</sub>: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Umur pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa lama pemerintah daerah tersebut berlangsung sejak didirikan (Alfi & Sari, 2023). Umur pemerintah menunjukkan tahun didirikannya suatu kabupaten atau kota yang ditetapkan melalui undang-undang tentang pembentukan daerah. Semakin lama pembentukan suatu pemerintah daerah berarti pemerintahan daerah tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola daerahnya yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Rofiq & Arza, 2021). Pengalaman yang dimaksud adalah pemerintah daerah dalam menjalankan sistem administratifnya yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan keuangan. Semakin berpengalaman suatu pemerintah daerah diharapkan proses administratif tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Peningkatan pendapatan daerah tersebut dapat mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat. Didukung dengan hasil penelitian Alfi & Sari (2023) dan Kramaric & Miletic (2022) yang menyatakan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>3</sub>: Umur pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Kompleksitas pemerintah merupakan tingkatan diferensiasi yang ada pada pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan (Saputro & Mahmud, 2015). Kompleksitas pemerintah menggambarkan kondisi berbagai faktor yang memengaruhi tata kelola pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat digunakan sebagai cerminan tingkat diferensiasi di Indonesia. Jumlah SKPD menggambarkan banyaknya urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya. Jumlah SKPD yang banyak dalam suatu pemerintah daerah akan semakin kompleks dan sulit saat berkoordinasi antar SKPD lainnya yang menyebabkan potensi pencatatan



laporan keuangan tidak akurat. Pemerintah daerah dengan tingkat kompleksitas yang tinggi akan mempunyai jumlah dan jenis transaksi yang lebih signifikan. Semakin besar jumlah SKPD yang dimiliki, semakin kompleksnya pemerintahan yang dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena dihadapkan oleh berbagai tindak kecurangan dan penyelewengan keuangan (Wijayanti & Suryandari, 2020). Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan yang lebih besar untuk setiap divisi yang berbeda sehingga akan menyulitkan ketika akan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi yang berbeda.

**H<sub>4</sub>: Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

### Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari data keuangan dan non-keuangan. Data keuangan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI dan data non-keuangan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan website resmi masing-masing pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.542 pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia tahun anggaran 2020-2022. Ukuran sampel ditentukan menggunakan tabel *Isaac* dan *Michael* dengan tingkat kesalahan 10. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling yang menghasilkan 240 data sampel.

Tabel 4. 3 Definsi Operasional

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	KK	$KK = (RK \times 25\%) + (RN \times 25\%) + (RF \times 25\%) + (RE \times 25\%)$ Keterangan :	

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
		KK = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah RK = Rasio Kemandirian RN = Rasio Ekonomi RF = Rasio Efektivitas RE = Rasio Efisiensi Pembobotan rata-rata tertimbang ( <i>weighted average</i> ) pada masing-masing perhitungan rasio keuangan sebesar 25%.	(Mega & Saring, 2022)
Ukuran Pemerintah	UKP	Ukuran Pemerintah = Logaritma Total Aset	(Rofiq & Arza, 2021)
Jumlah Penduduk	PEND	Jumlah Penduduk = Total Penduduk berdasar	(Priyono <i>et al.</i> , 2018)
Umur Pemerintah	UMP	Umur Pemerintah = $\sum$ Tahun Pengesahan berdasarkan UU - Tahun Pengamatan	(Dewata <i>et al.</i> , 2018)
Kompleksitas Pemerintah	KP	Kompleksitas Pemerintah = Jumlah SKPD	(Wijayanti & Suryandari, 2020)

## Hasil

Analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk setiap variabel dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah, umur pemerintah, dan kompleksitas pemerintah mempunyai nilai mean lebih besar dari standar deviasi ( $Y = 0.75 > 0.05$  ;  $UKP = 28.91 > 0.74$ ;  $UMP = 52.30 > 22.35$  ;  $KP = 45.50 > 10.27$ ) dapat disimpulkan bahwa data tersebar secara merata dan mempunyai simpangan data yang cukup baik. Sedangkan untuk variabel jumlah penduduk memiliki nilai mean lebih rendah dari standar deviasi ( $PEND = 677742.6 < 695012.9$  artinya data tidak tersebar secara merata dan mempunyai simpangan data yang kurang baik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan uji *Skewness and Kurtosis tests for normality* menunjukkan hasil yang baik yaitu nilai probabilitas  $0.87 > 0.05$  lebih kecil dari nilai signifikansi. Selanjutnya, uji multikolinieritas dengan nilai *tolerance* menunjukkan nilai yang lebih dari 0.10 dan perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF)

lebih kecil dari 10 dengan nilai *tolerance* (UKP = 0.51; PEND = 0.40; UMP = 0.84; KP = 0.64) dan  $VIF < 10$  (UKP = 1.96; PEND = 1.2.50; UMP = 1.18; KP = 1.57). Sedangkan uji heteroskedastisitas dengan uji *White* menunjukkan nilai  $Prob > chi^2$  sebesar 0.24 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 artinya data terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari penyimpangan dan memenuhi uji asumsi klasik. Koefisien determinasi menunjukkan nilai 0.38 yang memiliki arti bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan 38% variabel independen yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan 62% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya.

Hasil pengujian hipotesis dengan signifikansi ( $\alpha=5\%$ ) disajikan pada tabel 2. Penentuan model estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa hasil terbaik *random effect model*, yang terpilih dua kali yaitu pada uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 4. 4 Hasil Penelitian

Hipotesis	Hasil	Keputusan
H1: Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Koefisien: 0.04. P-Value 0.00	H1 diterima
H2: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Koefisien: 9.03. P-Value: 0.26	H2 ditolak
H2: Umur pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Koefisien: -0.00. P-Value: 0.42	H3 ditolak
H2: Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Koefisien: -0.00. P-Value: 0.00	H4 diterima

### **Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Besarnya suatu ukuran pemerintah yang dilihat dari aset yang dimiliki dapat memengaruhi pelayanan publik yang diberikan serta sarana dan prasarana yang

memadai. Semakin besar total aset yang dimiliki daerah memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai pembiayaan kegiatan operasional dengan aset sendiri (Safitri *et al.*, 2023). Pemerintah daerah harus memelihara dan mengelola aset dengan optimal serta memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Didukung oleh teori *stewardship*. Pemerintah daerah sebagai *steward* harus mengelola aset dengan optimal. Aset yang dimiliki dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai *principal*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Zamzami & Rakhman (2023) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak. Besar atau kecilnya jumlah penduduk tidak dapat memberikan pungutan yang optimal terhadap pendapatan daerah dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan dan rendahnya penghasilan masyarakat serta sebaran penduduk yang tidak merata. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang tidak didorong oleh peningkatan kualitas hidup menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Hal tersebut tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah serta tidak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori *stewardship* belum mampu mengatasi permasalahan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui jumlah penduduk. Asumsi pada teori *stewardship* yakni terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, peningkatan penduduk di suatu daerah tidak menjamin bahwa masyarakat taat dan patuh terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Masyarakat sebagai *principal* tidak mampu dalam memberikan sumber daya yang maksimal kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nashiruddin & Witono (2024) dan Saldi *et al.* (2021) menyatakan bahwa jumlah



penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebagai cerminan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Umur Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa umur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak. Umur pemerintah yang sudah lama berdiri atau baru pemekaran tidak menjamin bahwa daerah tersebut lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah yang sudah lama berdiri belum tentu dapat dikatakan lebih mandiri dalam hal ekonomi dibandingkan dengan daerah yang baru pemekaran. Oleh karena itu, umur pemerintah daerah tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori *stewardship* belum mampu mengatasi permasalahan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui umur pemerintah. Umur administratif pemerintah daerah tersebut tidak mampu menunjukkan tujuan dan kesadaran steward dengan lebih meyakinkan masyarakat bahwa daerah tersebut telah cukup berpengalaman, sehingga masyarakat sebagai principal tidak mendapatkan pelayanan publik yang optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima. Kompleksitas pemerintah merupakan tingkat diferensiasi yang ada dalam pemerintahan baik di internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pemerintah daerah yang dicerminkan oleh jumlah SKPD. Semakin banyak jumlah SKPD yang dimiliki maka semakin kompleks pula pemerintahannya dan dapat mendorong terjadinya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kompleksitas yang tinggi dihadapkan dengan tantangan yang besar terhadap tindak

penyelewengan dan kecurangan keuangan seperti penyalahgunaan kas dan persediaan yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah (Wijayanti & Suryandari, 2020). Organisasi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi akan menghadapi kesulitan ketika akan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi dalam pemerintah daerah yang sangat berbeda. Didukung oleh teori *stewardship*. Jumlah SKPD sebagai pemerintah daerah (*steward*) telah memberikan sumber daya dalam mengelola aset daerah. Jumlah SKPD yang kecil dan tidak terlalu besar dapat memudahkan dalam koordinasi antar divisi yang berbeda dalam pemerintah daerah. Kemudahan tersebut menimbulkan keakuratan dalam proses administrasi dan pencatatan laporan keuangan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, umur pemerintah, dan kompleksitas pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah maka disimpulkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan. Jumlah penduduk dan umur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peneliti menyarankan supaya pemerintah daerah dapat terus meningkatkan pengelolaan aset secara efisien dan efektif serta melakukan pemeliharaan aset secara berkala untuk dapat memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga harus lebih mengefisiensikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengelola keuangan. Jumlah SKPD yang kecil atau cukup dalam suatu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih baik dalam mengelola APBD.

Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas penggunaan variabel independen lainnya yang diduga dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kinerja



keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan nilai adjusted  $r^2$  pada penelitian ini masih kecil yaitu 36 persen, artinya masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih signifikan yang memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengujian empiris selanjutnya dapat menggunakan perspektif teori dan metode riset yang berbeda sehingga dapat memberikan representasi terkait kinerja keuangan pemerintah daerah lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Alfi, M., & Sari, V. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098–1114. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>
- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 584–598.
- Bulo, Y. (2020). Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1, 1–14. <https://doi.org/10.29264/jiam.v4i3.5029>
- Chrisman, J. (2019). Stewardship Theory: Realism, Relevance, and Family Firm Governance. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 43(6), 1051–1066. <https://doi.org/10.1177/1042258719838472>
- Dewata, E., Jauhari, H., Aprianti, S., & Hijria, E. (2018). The Effects of Local Government Characteristics and Audit Opinion on The Performance of District and City Governments in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 151–162. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.9057>
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 445–255. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447>
- Gatawa, G. (2022). Financial Stewardship of Cooperatives. *Advance: Social Sciences and Humanities*, 1–9. <https://doi.org/10.31124/advance.19350134.v1>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS. Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang.

- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 147-155. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4176>
- Masdiantini, P., & Erawati. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150-1182.
- Mega, M., & Saring, S. (2022). Factors Affecting The Financial Performance of Local Government An-Tecedents in Indonesia. *International Business and Accounting Research Journal*, 6(1), 15-23. <https://doi.org/10.35474/ibarj.v6i1.231>
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3837691>
- Noviyanti, A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>
- Nugroho, T., & Prasetyo, N. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27-34. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=460>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Ramadana, S., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Rofiq, I., & Arza, F. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3), 705-719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Safitri, B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2023). The Effect of PAD, Capital Expenditures, Government Size, and Budget Changes on

- Regional Financial Performance (in Central Java Province in 2019-2021). *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 10(4), 201–208. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v10i4.63>
- Sari, I. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1), 679–692.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2014). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*.
- Susanto, E., & Murtini, H. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–9. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9110>
- Tani, S., Amaliah, T., & Usman. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 239–249. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.4358>
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian Penelitian Bisnis & Pendidikan*.
- Widodo, S. (2022). Financial Performance of City/Municipality Government Before and After Balance Transfer Fund Allocation. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1), 38–55. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.118>
- Wijayanti, & Murtini, H. (2015). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Empat Siklus Penganggaran. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i2.7865>
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.22483>
- Zain, W. (2016). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal UNM*, 1(12), 13.
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>